

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, J, 1978, *Public Policy-Making, Second edition*. Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan 12. 2003. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015, *Naskah Akademik RUU Disabilitas*.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C., 1988, *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Coloridge, Peter, 1997, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia.
- Edi Suharto, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Dunn. William N. 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.
- Eko Riyadi, at., al., 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Fajri Nursyamsi, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Harsono, Hanifah, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

- Lijian Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bandung: Bumi Aksara.
- Lijian Poltak Sinambela, dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.
- Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Muh. Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., dkk, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA Lan Press.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Cet. IV*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, cet-3, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset.

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

Abdul Latief Danu Aji, Tiyas Nur Hayanti, “Diversitas Dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal UMS Volume 12*, No. 2, (Oktober, 2017).

Aprilina Pawestri, 2017, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Jurnal Era Hukum, Volume 2*, No. 1, (Juni, 2017).

Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Volume 21*, No. 3, (Juli, 2014).

Dani Amran Hakim, Budi Ispriyarso, “Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada Suatu Perusahaan”, *Jurnal Law Reform, Volume 12*, No. 2, (September, 2016).

Iffatus Sholehah, “Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*, Lembaga Swasta Pendidikan dan Pelatihan Edukasi Yogyakarta”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1*, No. 1, (Juni, 2017).

Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan”, *Jurnal Hukum Volume 23*, No. 4, (Oktober, 2016).

M. Syafiie, “*Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*”, *Jurnal Inklusi Volume 1*, No. 2, (Juli-Desember 2014).

Mukmin Zakie, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, *Jurnal Hukum, Volume 13*, No. 1, (Januari, 2006).

Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*”, *Jurnal Inovatif Volume 7*, No. 1, (Januari, 2015).

Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, “Pelayanan Publik Bidang Transportasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal UNY Volume 10*, No. 2, (September, 2013).

Ujang Charda S., “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk”, *Jurnal Hukum Syiar Hukum, Volume 12*, No. 2, (Juli, 2010).

Yossa A.P Nainggolan. “Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia”, *Jurnal Difabel Volume 3*, No. 1, (Nopember, 2016).

Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7*, No. 2, (Mei-Agustus, 2013).

Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Internet:

<https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-daerah/201> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2018, pada pukul 21.58 WIB).

<http://bambang-rustanto.blogspot.com/2014/05/konsep-disabilitas.html> (Diakses pada tanggal 30 Maret 2018, pada pukul 10.59 WIB).

<https://www.kemsos.go.id/berita/sewon-deklarasikan-sebagai-kawasan-inklusif-penyandang-disabilitas> (Diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pada pukul 22.09 WIB).

www.dinkes.bantulkab.go.id, (Diakses pada tanggal 5 September 2018, pada pukul 17.00 WIB).